

Retorika Politik Dalam Pemilu 2019 dan Cerminan Budaya Kekerasan

Nabila Auliani Ruray

Asisten peneliti pada Institute for International Studies, bidang Peace and Conflict, Fisipol- UGM, Yogyakarta, Indonesia
nabilaaulianiruray@gmail.com

Abstract: In recent years, the screen of Indonesian society has been filled with controversies about the use of certain words. Social media and news portals boast about Fadli Zon's poem entitled 'There is a Genderuwo in the Palace,' which was later answered by Arsul Sani's poem entitled 'There is a Genderuwo in Senayan.' This incident did not appear suddenly. Previously, local political elites such as Jokowi used the phrase 'Genderuwo politics,' 'sontoloyo politicians,' and Prabowo with a 'Boyolali look' expressed in several different speeches. Given the Indonesian context that entered the 2019 Election, the words and phrases 'masterpieces' were managed to wrinkle many of these brows is nothing but a part of the political attitude of the writer. Submission of written and oral words with the aim of satisfying the arrangement of the political attitude of the whole is indeed a common thing. However, the unusual use of words and phrases in the phenomenon of the Indonesian political year becomes interesting when the formulation of the language comes in the euphemism.

Keywords: Genderuwo; Jokowi; Prabowo; Istana; kekerasan

Pendahuluan

Belakangan ini, layar gawai masyarakat Indonesia dipenuhi dengan kontroversi pemakaian kata-kata tertentu. Media sosial dan portal-portal berita ramai menggunjingkan puisi gubahan Fadli Zon berjudul 'Ada Genderuwo di Istana,' yang kemudian dibalas dengan puisi gubahan Arsul Sani berjudul 'Ada Genderuwo di Senayan.' Insiden ini tidak muncul secara tiba-tiba. Sebelumnya, elit-elit politik lokal seperti Jokowi mempergunakan frase 'politik Genderuwo,' 'politisi sontoloyo,' serta Prabowo dengan 'tampang Boyolali' yang diekspresikan dalam beberapa pidato berbeda.

Mengingat konteks Indonesia yang memasuki Pemilu 2019, kata dan frase 'mahakarya' yang berhasil mengernyitkan banyak keinginannya tidak lain merupakan bagian dari retorika politik. Penyampaian kata tertulis dan lisan dengan tujuan persuasif yang menyusun retorika politik secara keseluruhan ini memang merupakan hal yang biasa terjadi. Bagaimanapun, pemakaian kata dan frase tidak lazim dalam fenomena tahun politik Indonesia ini menjadi menarik ketika perumusan bahasa tersebut datang dalam balutan eufemisme.

Retorika politik yang dibawa oleh elit politik memang tidak bisa lepas dari pembangunan narasi, di mana narasi sendiri mengharuskan lebih dari sekadar cerita. Yang diperjuangkan dalam pembangunan narasi adalah bagaimana sekumpulan cerita, insiden, ide, dan bahkan makna bisa dilihat sebagai satu kesatuan yang utuh. Lantas, apa peran eufemisme di sini? Tentunya setiap kata dan frase membawa makna tersendiri, yang dalam konteks ini beberapa kata dipilih sebagai representasi implisit nan halus akan subjek lawan yang harus dimusuhi sebagai the other atau liyan.

Pembahasan

Penokohan Genderuwo dalam frasa ‘politik Genderuwo’, misalnya, bukan secara kebetulan keluar dari mulut Jokowi. Entah sudah melalui perumusan yang matang atau secara spontan saja, ada makna yang membuat frase yang sebenarnya menjelaskan tentang praktek menakut-nakuti masyarakat sebagai strategi politik tersebut bisa direpresentasikan dengan simbol Genderuwo itu sendiri. Terlepas dari latar belakang mitologi dan etimologi yang mengikat ‘Genderuwo,’ ‘Sontoloyo,’ atau ‘tampang Boyolali’; fungsi utamanya adalah bahwa bahasa tersebut mengalami proses ‘penghalusan’ melalui pemilihan kata-kata yang secara budaya dekat dengan masyarakat.

Lantas, kedekatan inilah yang menjadi balut eufemisme dalam mengungkapkan makna-makna politik yang sekiranya bisa dengan mudah dicerna telinga masyarakat.

Perlu ditekankan bahwa ini bukanlah persoalan bahasa belaka. Dalam segitiga kekerasan yang diusung Johan Galtung (1969), fenomena ini bukan termasuk kekerasan langsung (direct violence) dan kekerasan struktural (structural violence), namun merupakan kekerasan kultural (cultural violence). Masyarakat, sebagai para pemilih Pemilu 2019, harus memahami bahwa justru karena menyoal bahasa, adu eufemisme ini lebih jauh berpengaruh pada konstruksi logika dan budaya politik tanah air.

Ketika ditelusuri lebih jauh, kontestasi narasi yang diperhalus ini merupakan bentuk dari kekerasan karena sejatinya bahasa sebagai instrumen mampu memfasilitasi proses peliyangan (othering) serta dehumanisasi. Sebagai bagian kecil dari budaya, praktek peliyangan dan dehumanisasi melalui bahasa secara jangka panjang merupakan salah satu elemen paling klasik dalam konflik, khususnya terkait identitas. Kembali kepada segitiga kekerasan Galtung, konflik yang kita bayangkan sebagai perang, persekusi, baku hantam, dan lainnya merupakan kekerasan langsung yang hanya merepresentasikan sebagian kecil dari keseluruhan konflik; the tip of the iceberg. Yang sering kali dilupakan adalah bahwa dibalik konflik sebagai fenomena gunung es, ada elemen kekerasan kultural dan struktural yang turut menopang adanya tindak laku fisik tadi. Mentang-mentang kita tidak menyaksikan adanya kekerasan langsung, tidak berarti kehidupan sehari-hari damai secara budaya dan struktur.

Ketika label “Genderuwo” diberikan oleh Fadli Zon kepada tokoh tertentu melalui bait puisi ‘ada genderuwo di istana [...] mahluk halus rendah strata’ di media sosialnya, terlaksana sebuah proses dehumanisasi di mana subjektivitas tokoh tersebut ditutupi oleh cap Genderuwo sehingga dinegasikan derajat dan kualitas baiknya sebagai manusia. Dengan negasi ini, peliyangan secara lazim terjadi karena yang dianggap berposisi less of a human dalam sebuah garis pemilahan terletak di sisi lain sebagai the other. Proses ini bahkan bisa melampaui negasi dan secara absolut menolak kemanusiaan subjek tertentu atas tujuan antipati (Haslam, 2014). Pemikiran biner menjadi sebuah ritual yang dipraktekkan secara terus-menerus; penyederhanaan bahwa jika seorang bukanlah bagian dari kubu ini, maka ia merupakan bagian kubu itu – the other yang pantas dimusuhi.

Pemaparan akan kondisi ini secara nyaris sempurna dikemukakan oleh kutipan pertanyaan Hegel dalam literatur Violence oleh Slavoj Zizek (2008); bagaimana jika manusia melampaui kapasitas hewan untuk kekerasan karena manusia bisa berbicara? Adu eufemisme dalam terminologi Zizek merupakan symbolic violence (*ibid.*); kekerasan yang tertanam dalam bahasa. Pertanyaan bernada pesimis di atas menunjukkan bagaimana bahasa merupakan bagian dari simbol yang terpakai sehari-hari secara verbal dan non-verbal sebagai medium dari kekerasan dan, bahkan, kekerasan itu sendiri.

Berkaca dari catatan sejarah tanah air, kekerasan simbolik dan kultural ini merupakan bagian dari beberapa konflik besar dengan kehadiran kekerasan langsung seperti Tragedi 1998, konflik Poso, Ambon serta Sampit, kerusuhan Situbondo, dll. Pada Tragedi 1998, misalnya, kata ‘pribumi’ dan ‘non-pribumi’ menjadi simbol yang sangat berpengaruh secara sosial dan budaya dalam memfasilitasi kekerasan berupa pembunuhan, perampukan, pemerkosaan, dan perusakan properti yang terjadi. Ketika kelompok tertentu merupakan ‘non-pribumi,’ menurut konstruksi narasi yang ditawarkan label ini, maka kekerasan langsung terhadap mereka adalah masuk akal dan terlegitimasi.

Kesimpulan

Tentu saja perlu dicatat bahwa dalam konteks tersebut peran bahasa tidak lekat dengan eufemisme, karena dengan sengaja tidak diperhalus dan dibiarkan eksplisit. Perbedaan ini tidak menjadikan praktek yang terjadi tidak bisa dibandingkan sama sekali, karena dalam fenomena penggunaan bahasa sebagai kekerasan kultural, ada atau tidaknya eufemisme tidak lantas mengurangi relasi tertentu dengan kekerasan.

Sesungguhnya keseluruhan penulisan ini tidak bertujuan untuk menyebarkan kabar yang sekiranya tidak berdasar bahwa elit politik secara tidak langsung melakukan tindak kekerasan. Dengan menyadari peran-peran kata dan frase ‘politik Genderuwo,’ ‘politisi sontoloyo,’ serta ‘tampang Boyolali’ sebagai bahasa yang sangat mampu menghadirkan kekerasan, poin terpenting adalah bahwa budaya kekerasan hidup di berbagai ranah berbeda, tidak terkecuali pada Pemilu 2019. Ia bahkan dirawat dengan baik melalui konstruksi narasi dalam retorika politik kubu-kubu elit yang terlibat, selayaknya didiskusikan sejak awal.

Berangkat dari sini, kewajiban dari masyarakat sebagai para konsumen dari retorika politik adalah untuk menjadi peka akan adu eufemisme yang sedang terjadi sebagai instrumen untuk ‘mengkotak-kotakkan’ masyarakat. Dengan kesadaran penuh ini pula individu mampu memilih untuk tidak terjebak di dalamnya. Terlepas dari pilihan politik pribadi, nalar kritis terhadap sistem dan budaya di seputar kedua poros berbeda tersebut – khususnya terkait kekerasan – penting untuk ditegakkan. Panjangnya umur para organic thinkers niscaya akan mengawal budaya sosial dan politik yang lebih substantive.

Daftar Pustaka

- Herpamudji, D. H. (2015). Strategi Kampanye Politik Prabowo-Hatta dan Perang Pencitraan Di Media Massa Dalam Pemilu Presiden 2014. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 6(1), 13-24.
- Kompas. (2013). Pemilu legislatif: daftar ri-wayat hidup caleg dipublikasikan” Rubrik Politik dan Hukum, Harian Kompas. Sabtu, 8 Juni 2013.
- Rush, M. & Althoff, P. (1997). An Introduction to Political Sociology, atau Pengantar Sosiologi Politik, terj. Kartini Kartono, Jkt: Ra-jawali Pers.
- Susanto, E. H. (2012). Iklan politik dan kega-galan partai politik” dalam media dan ko-munikasi politik (ed. Heri Budianto). Jakarta: Litera
- James, E Combs. 1982. Polpop: Political and popular culture in American: Brucnkie. Ohio: King's Court Communiction
- J. Street. 1997. Polyic and Popular Culture. Cambridge: Politic Press.
- Strisnati Dominic. 2009. Popular Culture. Yogjakarta: A. Ruzz Media.
- Wisnu Martha Adipura. 2006. *Jurnal Polysemeia: Budaya Populer dan Demokrasi*, Jakarta: Pusat Kajian Media dan Budaya Populer (PKMBP)